

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ASAL USUL GERAKAN BDS (BOIKOT, DIVESTASI, SANKSI) DI INDONESIA

2.1. Gerakan BDS

Gerakan BDS lahir pada tanggal 9 Juli 2005. Gerakan ini dicetuskan oleh Omar Barghouti dan komunitas masyarakat Palestina, sebagai gerakan yang menandai perjuangan rakyat Palestina di luar perjuangan sipil untuk meraih kemerdekaan mereka sepenuhnya. Akan tetapi, jauh sebelum tanggal peresmian tersebut, cikal bakal esensi gerakan BDS telah muncul dalam waktu yang cukup lama. Diketahui dari acara konferensi UN World Conference Against Racism in Durban, South Africa pada tahun 2001, partisipan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) SANGOCO membandingkan Israel dengan politik apartheid Afrika Selatan (Lustick & Shils, 2022). Konferensi tersebut menyatakan bahwa Israel adalah negara rasis yang melakukan politik apartheid dengan melakukan tindakan pelanggaran kemanusiaan seperti segregasi, pembatasan akses tanah, dan denasionalisasi terhadap masyarakat Palestina (Hanafi, 2001). Tindakan Israel kurang lebih sama dengan politik apartheid di Afrika Selatan yang memisahkan warga asli dengan warga pendatang berdasarkan rasial.

SANGOCO dalam konferensi tersebut menaruh simpati yang besar terhadap masyarakat Palestina—karena mereka mengunjungi Palestina selama Intifada dan melihat bagaimana proses Perjanjian Oslo yang memosisikan masyarakat Palestina dalam ketidakadilan secara langsung (Hanafi, 2001)—

sehingga mereka mendeklarasikan suatu aksi untuk menyerukan kepada komunitas internasional agar mereka mengisolasi Israel, atau dapat dikatakan mengabarkan secara global bahwa Israel adalah negara yang apartheid (Hatuel-Radoshitzky, 2015). Aksi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kebijakan isolasi terhadap Israel, memberikan sanksi dan embargo, dan menghentikan hubungan diplomatik maupun ekonomi dari setiap negara terhadap Israel. LSM tersebut melihat jika Afrika Selatan telah mengalami sejarah melawan politik apartheid sehingga mereka vokal untuk mengajukan aksi yang sama.

Konferensi UN World Conference Against Racism in Durban, South Africa memang tidak berdampak besar. Akan tetapi, isinya dapat dijadikan sebagai titik balik dalam sejarah gerakan hak asasi manusia global—terutama bagi masyarakat Palestina. Partisipasi warga lokal saja tidak cukup untuk membuat pengaruh apalagi menekan Israel sehingga mereka memerlukan dukungan dari masyarakat global agar dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan Israel.

Adapula aksi yang mirip diajukan oleh aktivis pro-Palestina di wilayah Amerika Serikat. Pada tahun 2001, sebuah kelompok masyarakat yang bernama Stop US Taxpayer Aid to Israel Now (SUSTAIN) mengajukan gagasan divestasi—yaitu menekan lembaga yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan Israel agar melepas kepemilikan mereka—dan melakukan kampanye terbuka pada masyarakat (Erakat, 2010). Akan tetapi, kehadiran mereka ditolak mentah-mentah dan dianggap dapat mengasingkan warga

Amerika biasa. Kelompok tersebut akhirnya berfokus untuk melakukan kampanye pada golongan muda yang tertarik pada keadilan global lalu menunggu waktu yang tepat agar kampanye ini dapat berkembang lebih besar.

Masyarakat Palestina sendiri sudah mengenal bagaimana gerakan boikot, divestasi, dan sanksi bekerja. Pada awalnya, mereka mengandalkan perjuangan fisik untuk meraih kemerdekaan mereka sepenuhnya. Lambat laun, mereka menyadari jika mereka memerlukan pengaruh yang lebih besar tanpa harus mengandalkan kekuatan fisik untuk menekan Israel.

Perlu cukup waktu hingga mereka meresmikan gerakan ini sebagai seruan global. Ketika Israel melakukan penyerangan pada tahun 2002, kelompok akademisi Palestina menerbitkan sebuah surat secara daring dimana isinya merupakan seruan kepada masyarakat global untuk menunjukkan integritas etis dengan menuntut pemerintah agar menghentikan bantuan militer kepada Israel dan memberikan sanksi ekonomi (Morrison, *Border-crossing repertoires of contention: Palestine activism in a global justice context*, 2020). Kemudian, beberapa bulan selanjutnya, komunitas masyarakat Palestina menerbitkan artikel yang menyerukan isolasi total Israel melalui sanksi dan embargo. Mereka menyebut hal ini sebagai *Israel Boycott Campaign*—meski seruan ini belum tersusun secara komprehensif hingga dapat disebut aksi global. Akan tetapi mereka terus mempromosikan konsep dari gerakan BDS secara bertahap.

Terutama bagi para diaspora Palestina yang tersebar di seluruh dunia, mereka konsisten melakukan gerakan boikot terhadap semua lembaga

akademik dan kebudayaan Israel sebagai kontribusi terhadap perjuangan untuk mengakhiri pendudukan, penjajahan, dan sistem apartheid Israel (Palestinian Academics and Intellectuals, 2004). Inti dari gerakan ini kemudian dipromosikan menjadi kampanye internasional, yang selanjutnya diresmikan pada tahun 2003 dengan nama Palestinian Campaign for Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) (Morrison, *Border-crossing repertoires of contention: Palestine activism in a global justice context*, 2020). PACBI menyerukan kepada seluruh diaspora Palestina yang tersebar di berbagai tempat serta komunitas internasional untuk melakukan tiga langkah boikot: menghindari segala bentuk kerja sama dengan Israel dalam bidang akademik dan budaya, mendukung boikot menyeluruh terhadap lembaga-lembaga Israel di tingkat nasional hingga internasional, mendorong divestasi dan pelepasan investasi dari Israel oleh lembaga-lembaga akademis internasional, mendorong/mendesak lembaga akademik di negara masing-masing (bagi para diaspora) agar mengeluarkan resolusi untuk melepas keterlibatan dengan Israel, serta memberikan dukungan langsung kepada lembaga akademik dan budaya Palestina tanpa mengharuskan mereka bermitra dengan pihak Israel. Akademisi Palestina yang menjalankan pendidikan di luar negeri melakukan tindakan seperti: tidak menghadiri konferensi akademik yang berhubungan dengan Israel, menolak bertindak sebagai penilai makalah yang dikeluarkan institusi Israel, memboikot acara yang disponsori oleh institusi budaya Israel, menghimbau seniman Palestina untuk tidak tampil atau berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Israel, serta tidak berpartisipasi dalam acara

olahraga internasional yang melibatkan Israel (Morrison, *The Boycott, Divestment, and Sanctions Movement: Activism Across Borders for Palestinian Justice*, 2015). PACBI melihat para akademisi seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk mengurangi ketidakadilan. Oleh karena itu, mereka dihimbau untuk melakukan gerakan boikot pendidikan dan budaya untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri tindakan penindasannya.

Kemudian, atas dasar dari kampanye tersebut, banyak komunitas masyarakat Palestina yang lain menginisiasi gerakan serupa dengan skala yang lebih besar. Pada tahun 2005, sekitar 170 organisasi masyarakat sipil Palestina yang meliputi partai politik, komunitas pengungsi, komite perlawanan, serikat pekerja, kelompok perempuan, dan berbagai bagian dari gerakan nasional Palestina memberlakukan seruan gerakan global yang bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) (Maira, 2018). Boikot (*boycott*) merupakan suatu tindakan menarik dukungan. Divestasi (*divestment*) adalah penarikan atau penahanan aset dalam suatu bisnis. Sementara sanksi (*sanction*) adalah hukuman atau tekanan yang diberikan pemerintah atau organisasi internasional untuk memaksa negara tersebut untuk mematahi hukum internasional yang berlaku (Morrison, *The Boycott, Divestment, and Sanctions Movement: Activism Across Borders for Palestinian Justice*, 2015). Definisi tersebut merupakan pengertian secara umum, tetapi jika berhubungan dengan gerakan BDS, ketiga bentuk aksi tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme

tersendiri dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan bagian bagaimana ketiga aksi tersebut didefinisikan sebagai kesatuan arti dalam gerakan sosial.

Ketika dihubungkan dengan konteks dalam gerakan BDS, definisi ketiga jenis aksi tersebut akan lebih mendalam. Dalam boikot, terdapat dua unsur lain yang mengikutinya, yaitu tindakan nonkooperasi dan anti-normalisasi (Morrison, *The Boycott, Divestment, and Sanctions Movement: Activism Across Borders for Palestinian Justice*, 2015). Nonkooperasi adalah tindakan penolakan untuk mematuhi atau berkoordinasi dengan suatu pihak, sementara anti-normalisasi adalah menahan diri dari keterlibatan dalam hubungan diplomatik. Boikot membawahi kedua unsur ini sehingga dapat dikatakan menjadi satu definisi yaitu strategi penarikan dukungan produk, lembaga, kebudayaan Israel dan penolakan hubungan politik, ekonomi dengan lembaga Israel atau siapa pun yang terlibat hubungan dengan Israel. Langkah boikot ini sebagian telah dilakukan oleh PACBI, dimana fokus mereka adalah untuk mengharuskan semua akademisi diaspora Palestina agar menahan diri dari partisipasi dalam bentuk apa pun dari kerja sama akademik dan budaya, kolaborasi, atau proyek bersama dengan lembaga pendidikan Israel serta mendorong boikot menyeluruh terhadap institusi Israel di tingkat nasional dan internasional. Kemudian, ketika boikot menjadi aksi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara global, hal boikot yang dikampanyekan gerakan BDS adalah mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk Israel, memberikan informasi kepada masyarakat lain apabila ada produk yang berhubungan dengan perusahaan Israel atau yang berasal dari Israel. Saat ini,

terdapat tiga prioritas boikot yang dilakukan gerakan BDS untuk menekan perusahaan internasional yang memiliki keterlibatan dengan Israel, yaitu target prioritas boikot konsumen, boikot produk organik, penekanan terhadap pihak-pihak tertentu melalui kampanye (BDS, 2024).

Dalam gerakan BDS, divestasi bertujuan untuk menghilangkan investasi pada perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel. Salah satu contoh perusahaan ini adalah Caterpillar, perusahaan mesin Amerika Serikat, dimana mereka mengekspor mesin yang digunakan militer Israel untuk melancarkan operasi mereka di Palestina seperti: membangun tembok, menebang perkebunan zaitun, meratakan lahan pertanian, dan menghancurkan rumah penduduk sipil (Morrison, *The Boycott, Divestment, and Sanctions Movement: Activism Across Borders for Palestinian Justice*, 2015). Perusahaan ini dapat dikatakan berkontribusi secara tidak langsung dalam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut yang menyebabkan pihak-pihak di belakang gerakan BDS gencar mengampanyekan divestasi kepada perusahaan-perusahaan seperti Caterpillar. Dengan melakukan divestasi, diharapkan perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel dapat menyadari apabila produk yang mereka keluarkan untuk Israel secara langsung juga berkontribusi pada penindasan dan pelanggaran HAM. Kemudian, apabila perusahaan tersebut akhirnya memutuskan kontrak kerja sama dengan Israel, maka akan berdampak pada berkurangnya pasokan bantuan yang sebelumnya digunakan dalam operasi di wilayah Palestina.

Sementara itu, unsur sanksi dalam gerakan BDS sedikit berbeda dengan boikot dan divestasi. Sanksi, dalam ilmu hubungan internasional, merujuk pada kebijakan luar negeri suatu negara yang meliputi teguran, ancaman, dan/atau hukuman diberikan pada negara lain dengan tujuan mengubah perilaku negara tersebut (Mingst & Arreguín-Toft, 2017). Sanksi merupakan alat politik, alat kekuasaan yang dapat dikendalikan oleh negara yang memiliki kekuasaan yang besar pula. Kekuasaan besar yang dimaksud adalah posisi yang berpengaruh di internasional, dalam hal ini, negara-negara yang memiliki sumber daya besar (secara politis maupun ekonomi), atau memiliki peran yang strategis di pasar global. Merekalah yang mampu memberi sanksi terhadap negara yang telah melakukan tindakan bertentangan dengan norma, aturan, atau kebijakan yang diharapkan oleh komunitas internasional. Sebagai salah satu contoh, Afrika Selatan mendapat sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan organisasi PBB karena politik apartheid dan terdapat pelanggaran HAM di dalamnya. Sanksi ekonomi tersebut berujung pada berakhirnya politik apartheid dan perubahan kebijakan yang lebih terbuka untuk masyarakat kulit hitam. Contoh tersebut hanyalah satu dari sekian banyak sanksi yang diberikan komunitas internasional terhadap negara yang pernah melakukan pelanggaran.

Akan tetapi, terdapat kasus yang berbeda dari pola umum tersebut. Israel, dengan sejarahnya yang berkali-kali menyerang wilayah Palestina dan melakukan pelanggaran hukum internasional, hampir belum pernah mendapat sanksi secara signifikan dari komunitas internasional atau melalui mekanisme multilateral. Sepanjang sejarahnya, sanksi terhadap Israel lebih banyak bersifat

bilateral dan terbatas. Misalnya pada tahun 1967 dan 1969, Israel mendapat embargo senjata dari Prancis setelah peristiwa Perang Enam Hari serangan udara ke Bandara Beirut di Lebanon. Prancis menilai Israel menyerang terlebih dahulu dan melanggar hukum internasional dengan melakukan pendudukan di wilayah Arab (Eran & Calin, 2025). Saat itu pula, Israel ingin memperbaiki hubungan dengan negara Arab sebagai penghasil minyak sehingga mereka menerapkan embargo senjata—karena Israel merupakan salah satu importir Prancis—dengan harapan Israel akan mengurangi penyerangan terhadap wilayah Arab. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan dari embargo tersebut menyebabkan Israel beralih pada Amerika Serikat sebagai pemasok senjata. Mulai saat itu pula hubungan militer antara Israel dan Amerika Serikat terus meningkat. Tidak ada hambatan tertentu dalam kebijakan pertahanan dan militer Israel ketika Prancis memberikan embargo senjata kepadanya.

Dapat dikatakan jika Israel bergantung penuh pada Amerika dalam suplai senjata. Berdasarkan data dari SIPRI, sekitar 69% persen dari total impor senjata Israel selama 2019-2023 berasal dari Amerika Serikat (Bachmann, 2024). Apabila Amerika Serikat memberlakukan sanksi embargo senjata atau berhenti untuk mengekspor senjata, maka Israel akan benar-benar merasakan dampak nyata. Namun, sepanjang sejarahnya, tidak ada pemberian sanksi dari Amerika untuk Israel meski mereka memiliki instrumen hukum untuk mengeluarkannya. Hal ini dikarenakan Amerika selalu menganggap Israel sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan kepentingan nasionalnya di wilayah Timur Tengah. Oleh karena itu, jika mereka melemahkan posisi

Israel dengan memberikan sanksi maka berarti Amerika melemahkan kedudukannya pula di kawasan. Meski tidak dapat dipungkiri jika Israel telah banyak melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional—Amerika pun mengakui jika ada kemungkinan hal tersebut, akan tetapi mereka tidak pernah menyebut Israel sebagai pelanggar sistematis. Amerika cenderung mengatakan jika pengawasan dan koreksi saja sudah cukup. Artinya, selama Israel mengklaim jika mereka sudah melakukan ”perbaikan atas tindakannya” maka pelanggaran dianggap selesai. Dengan kata lain, ketergantungan Israel terhadap Amerika Serikat justru menjadi sumber perlindungan yang membuatnya relatif kebal terhadap tekanan internasional. Apabila Amerika tetap mempertahankan dukungan politik terhadap Israel, peluang bagi komunitas internasional lain untuk menjatuhkan sanksi efektif terhadap Israel akan tetap kecil.

Seperti yang sudah tertulis sebelumnya, belum terdapat sanksi yang berdampak signifikan terhadap Israel. Ketika Israel melakukan penyerangan dalam skala besar sepanjang tahun 2024-2025, beberapa pihak menjatuhkan sanksi terhadap Israel, tetapi sebagian besar di antaranya hanya menargetkan individual dan kelompok. Sebagai contoh, Uni Eropa menjatuhkan sanksi berupa larangan bepergian dan pembekuan aset kekayaan kepada lima orang pemukim Israel dan tiga entitas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 2024. Kemudian, beberapa negara seperti Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia juga melakukan hal serupa untuk menjatuhkan sanksi kepada individu-individu berpenghasilan besar di Israel. Kemunculan sanksi ini didorong akibat kasus penyerangan Israel terhadap Palestina yang terus

meningkat dan ditetapkan sebagai kasus genosida di Mahkamah Internasional (Martínez, 2025). Akan tetapi, sanksi-sanksi kecil ini sama saja seperti sanksi-sanksi sebelumnya, tidak memberikan dampak nyata bagi perubahan politik Israel, karena banyak negara yang memiliki kekuatan besar mendukung kedudukan Israel secara diplomatik.

Pemahaman mengenai praktik sanksi di tingkat negara memberikan landasan untuk memahami bagaimana konsep sanksi diadopsi dalam gerakan BDS. Akan tetapi, istilah sanksi dalam gerakan BDS tidak merujuk pada tindakan negara secara langsung, melainkan upaya masyarakat mendorong negara atau lembaga berpengaruh agar menjatuhkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Israel. Dalam publikasi resmi BDS, aksi sanksi terinspirasi oleh langkah-langkah penegakan hukum yang diadopsi PBB terhadap apartheid di Afrika Selatan (BDS, n.d.). Pelanggaran berat terhadap hukum internasional seperti agresi, penguasaan wilayah, kolonialisme, kejahatan terhadap kemanusiaan, apartheid, hingga genosida memicu dua kewajiban hukum bagi tiap negara dan organisasi internasional: untuk bekerja sama guna mengakhiri pelanggaran berat tersebut melalui cara-cara yang sah, dan untuk tidak mengakui sebagai situasi yang diciptakan oleh pelanggaran berat tersebut serta tidak mendukung ataupun membantu.

Gerakan BDS mengadopsi definisi sanksi yang memadukan kewajiban tersebut, dimana artinya sanksi bukan hanya pemberian hukuman secara politik atau ekonomi, tetapi juga suatu kepatuhan terhadap kewajiban moral dan hukum internasional dengan berhenti terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan,

sekaligus mendorong negara lain untuk bertindak. Dengan demikian, ketiga bentuk aksi tersebut—boikot, divestasi, dan sanksi—merupakan satu kesatuan gerakan yang mencerminkan perjuangan meraih keadilan untuk masyarakat Palestina. Untuk memahami bagaimana gerakan BDS bekerja dan berkembang, penting untuk melihat karakteristik gerakan ini terlebih dahulu.

Sebagai salah satu pendiri gerakan BDS, Omar Barghouti, kampanye gerakan ini didasarkan pada ”pendekatan menyeluruh yang berorientasi pada hak asasi manusia, yang tumbuh dari perjuangan rakyat Palestina selama puluhan tahun menghadapi kolonialisme pemukim” (Maira, 2018). Jauh sebelum gerakan BDS dibentuk pada 9 Juli 2005, perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai keadilan berdasar pada perlawanan sipil terhadap kolonialisme pemukim Zionis. Karena itu, lahirnya gerakan BDS menandai fase baru dalam upaya ”melawan” pendudukan Israel melalui kampanye global boikot, divestasi, dan sanksi. Kemudian, dengan fondasi tersebut, gerakan BDS bertujuan untuk menuntut Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat internasional juga memiliki tanggung jawab moral dan politik, mengingat banyak pemerintahan mereka turut terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Israel (Barghouti, 2015).

Gerakan BDS memiliki tiga tuntutan utama (Barghouti, 2015). Pertama, mengakhiri pendudukan dan kolonisasi yang dilakukan Israel di wilayah Palestina yang direbut sejak Perang Enam Hari 1967. Wilayah tersebut meliputi Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Kedua, Israel harus mengakui dan

menjamin kesetaraan hak bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah Israel. Hal ini merujuk pada penghapusan diskriminasi berdasarkan wilayah dan menarik kebijakan yang bersifat apartheid. Ketiga, Israel harus menghormati hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah asal mereka. Banyak jutaan warga Palestina terpaksa mengungsi ke wilayah lain sejak tahun 1948 dan mereka berhak kembali ke negaranya. Pernyataan ini sesuai dengan Resolusi PBB 194 yang menetapkan bahwa "pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka harus diizinkan dan dilakukan dengan sesegera mungkin, serta harta benda yang telah hilang dan rusak harus diganti oleh pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab" (UNRWA, n.d.).

Ketiga tuntutan ini kemudian menjadi tiga kerangka besar yang sesuai dengan nilai dan norma global: kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tepatnya di bagian preambull menyebutkan bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut dari manusia adalah hak kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Hak asasi manusia adalah hal yang fundamental, harus dilindungi oleh hukum, dan merupakan standar pencapaian bersama bagi semua bangsa (United Nations, 1948). Dalam International Covenant on Civil and Political Rights pasal 1 pun disebutkan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib, kepentingan menggunakan kekayaan dan sumber daya alam mereka sendiri, serta keadaannya tidak boleh dirampas oleh siapa pun (OHCHR, 1966). Kedua instrumen internasional tersebut diadopsi di bawah naungan PBB yang disetujui oleh sebagian besar negara anggotanya. Ketika UDHR dicetuskan, 48 negara anggota dari 58

keseluruhan menandatangani kesepakatan tersebut (United Nations, 2015) lalu, kini, UDHR menjadi standar minimum yang harus dihormati setiap negara, meski hanya bersifat perjanjian bukan hukum yang mengikat (United Nations, 1948). Artinya, nilai-nilai di dalamnya telah diterima sebagai norma universal yang menjadi dasar tata hubungan internasional modern. Dengan kata lain, tiga prinsip yang menjadi kerangka gerakan BDS selaras dengan komitmen global terhadap penghormatan hak asasi manusia.

Secara sederhana, gerakan BDS menyerukan prinsip "masyarakat Palestina berhak mendapat hak yang sama dengan seluruh umat manusia" (Maira, 2018). Dalam hal ini, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang menjadi nilai dan norma komunitas internasional dan merupakan suatu hal yang perlu dicapai oleh tiap negara. Keadaan yang diterima oleh masyarakat Palestina saat ini jauh dari norma dan nilai global yang selalu dijunjung oleh komunitas internasional. Penindasan yang dilakukan Israel selama beberapa dekade lamanya tidak mendapat respons lemah dari komunitas internasional atau kekebalan Israel untuk tidak mendapat sanksi menyebabkan masyarakat Palestina harus mengambil jalan lain untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Gerakan BDS merupakan gerakan nonkekerasan, yang jelas taktiknya berbeda daripada perlawanan bersenjata. Gerakan BDS mengambil jalur diplomatik, sosial, dan membawa nilai moral dalam skala global menjadi jalur perjuangan mereka (Morrison, *The Boycott, Divestment, and Sanctions Movement: Activism Across Borders for Palestinian Justice*, 2015). Aksi kolektif yang mereka bangun akan menjadi bentuk tekanan bagi komunitas internasional—

terutama terhadap Israel—dengan tujuan mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada keadilan bagi Palestina. Melalui cara ini, mereka menaruh harapan bahwa kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan rakyat dapat tercapai.

Karena nilai dan norma global dalam perjuangan masyarakat Palestina, gerakan ini secara inheren dirancang untuk menjadi *global justice movement*, yaitu gerakan transnasional yang memperjuangkan norma-norma universal di masyarakat global (Baumgart-Ochse, 2017). Gerakan boikot yang telah ada sebelumnya—seperti yang diterapkan oleh masyarakat Afrika Selatan—lebih banyak berfokus untuk perjuangan di dalam negara saja—tetapi gerakan BDS membangun citra dirinya sebagai perjuangan moral umat manusia. Gerakan BDS menciptakan jembatan antara perjuangan lokal masyarakat Palestina dengan solidaritas masyarakat sipil global sekaligus menjadi *moral anchor*—atau pengingat bahwa perjuangan Palestina adalah bagian dari perjuangan manusia untuk dunia yang lebih adil.

Ketika gerakan BDS telah memiliki fondasi yang kuat agar mereka dapat bergerak secara global, mereka mengembangkan strategi yang memungkinkan nilai dari gerakan ini dapat disalurkan melalui berbagai bentuk aksi kolektif secara lintas negara. Strategi ini dinamakan sebagai *repertoire of contention*, yaitu seperangkat pola aksi dan organisasi yang digunakan oleh gerakan sosial transnasional untuk memperluas jangkauan pengaruhnya di tingkat global (Morrison, *Border-crossing repertoires of contention: Palestine activism in a global justice context*, 2020). Pelaksanaan dari strategi ini adalah

munculnya badan BDS National Committee (BNC), sebuah badan koordinasi Palestina untuk kampanye di seluruh dunia (BDS, n.d.).

Badan ini terdiri atas koalisi masyarakat Palestina yang meliputi: pengungsi, masyarakat Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta masyarakat Palestina di Israel (Barghouti, 2015). Dibentuk pada tahun 2007, BNC merumuskan strategi dan program aksi yang sesuai dengan gerakan BDS yang terbentuk pada 9 Juli 2005. Badan tersebut menjadi titik acuan masyarakat Palestina untuk melakukan dan menyebarkan kampanye gerakan BDS di seluruh dunia. Sebagai contoh, BNC melakukan pidato publik kepada masyarakat untuk mengampanyekan apa itu gerakan BDS. Kemudian, penyusunan konsep kampanye melalui media seperti *website* juga mereka kembangkan agar gerakan BDS dapat dijangkau oleh masyarakat global melalui internet. BNC turut terjun langsung bersama aktivis BDS untuk melakukan kampanye, melakukan jangkauan media di Palestina dan luar negeri—menyusun konsep kampanye agar dapat diterima masyarakat global dalam jumlah besar, hingga melakukan advokasi melalui pemberian pengarahan dan lobi kepada para pembuat kebijakan (BDS, n.d.).

Namun, bukan berarti BNC menjadi badan yang menciptakan dan mengendalikan gerakan BDS di berbagai negara lalu membuatnya sebagai jaringan transnasional. Peran BNC di sini hanya sebagai koordinator dan pelaku kampanye gerakan BDS global. Keberadaan berbagai kelompok BDS di berbagai negara muncul atas inisiatif masyarakat sipil di negara masing-masing sebagai respons atas seruan kampanye gerakan BDS global. Umumnya,

kelompok-kelompok ini mengadaptasi panduan dan prinsip yang diterbitkan BNC—atau *website* kampanye yang telah diunggah oleh gerakan BDS—agar dapat mereka sesuaikan dengan kondisi lokal di negara masing-masing. Mereka membawa prinsip dan tujuan yang sama dengan gerakan BDS. Dengan begitu, gerakan BDS di setiap negara saling terhubung satu sama lain dan terbentuklah suatu jaringan lintas batas negara.

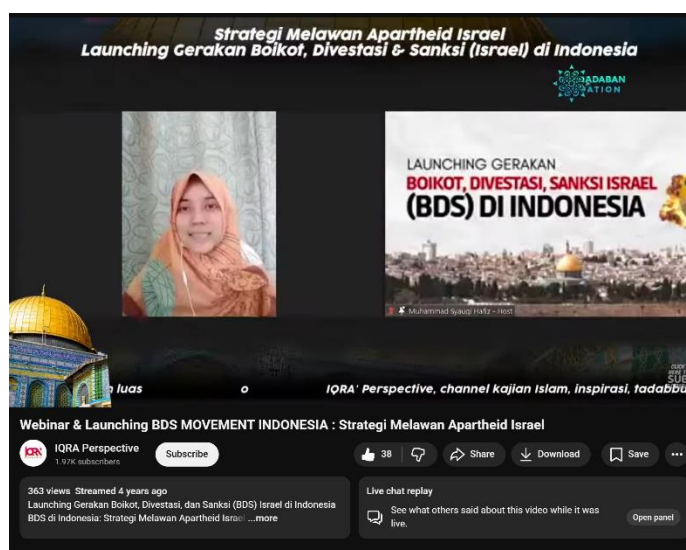
Gerakan BDS di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, di negara Belgia, gerakan ini tidak langsung muncul ketika gerakan BDS dirilis pada tahun 2005. Sebelumnya, gerakan boikot untuk Israel telah diinisiasi oleh komunitas pendukung Palestina bernama Codip di tahun 2000 (BDS, 2010). Aksi kampanye yang rutin dilakukan menyebabkan gerakan ini terus berkembang hingga dibentuk struktur koordinasi baru bernama COBI (Cordination Boycot Israël) tujuh tahun setelahnya. Mereka mengadopsi istilah dan retorika yang identik dengan BDS global, serta menyatakan bahwa mereka bergabung dengan seruan gerakan BDS yang dikeluarkan masyarakat sipil Palestina.

Pola yang mirip terjadi dengan perkembangan gerakan BDS di Amerika Serikat. Berbagai koalisi masyarakat sipil telah membentuk gerakan boikot Israel sejak 2001 dengan kampanye yang bernama US Campaign for Palestinian Rights (USCPR). Kampanye ini berupaya mengakhiri dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dan kebijakan apartheid yang dilakukan di Palestina. Setelah seruan gerakan BDS global muncul—terutama terbentuknya organisasi koordinator dari gerakan BDS, BNC,—badan USCPR menjadi sponsor fiskal

yang membantu pengelolaan administratif dan pendanaan bagi BNC (Rosen & Leibovitz, 2018).

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya gerakan untuk melakukan boikot pada negara yang telah melanggar hukum internasional tersebar ke berbagai negara, lalu mereka mengadopsinya dan melakukan seruan yang sama sebagaimana yang telah dikampanyekan oleh gerakan BDS. Mereka menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tetap menyampaikan kampanye tersebut dengan tujuan yang sama.

2.2. BDS Indonesia sebagai bagian dari Gerakan BDS



Gambar 2. 1. Perilisan Gerakan BDS Indonesia

Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=idtGb03nRbs&list=WL&index=2&t=5475s>

Gerakan BDS di Indonesia secara resmi diluncurkan pada 29 Mei 2021 melalui webinar *online* yang disiarkan di kanal YouTube dengan judul “Webinar & Launching BDS MOVEMENT INDONESIA: Strategi Melawan

Apartheid Israel” (IQRA Perspective, 2021). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan gerakan BDS dan inisiator di balik BDS Indonesia. Dari pihak perwakilan BDS, terdapat Omar Barghouti—selaku *co-founder* dari gerakan BDS—dan Apoorva Gautam, seorang koordinator gerakan BDS di wilayah Asia Pasifik. Sementara dari pihak BDS Indonesia, terdapat Dimas Muhammad, sebagai salah satu *co-founder* BDS Indonesia dan beberapa tokoh masyarakat seperti Sudarnoto Abdul Hakim (Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional) dan Ulil Abshar Abdalla (Cendekiawan Muslim) serta beberapa tokoh publik lainnya. BDS Indonesia berperan sebagai bagian dari jaringan gerakan BDS secara global yang bersifat mandiri dan kontekstual, artinya menyesuaikan strategi dan bentuk kampanye dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Sebelum peluncuran resmi tersebut, inisiatif pembentukan BDS Indonesia telah dirancang melalui berbagai diskusi dan pertemuan internal antara pihak Indonesia dan jaringan BDS Global. Dimas Muhammad menyebut bahwa ia sempat beberapa kali bertemu langsung dengan Omar Barghouti untuk membahas pembentukan gerakan BDS di Indonesia. Lalu, baik dari pihak gerakan BDS maupun para penggagas dari Indonesia melihat bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mereka setuju dengan pernyataan bahwa diplomasi yang telah dilakukan banyak negara hingga hukum internasional yang telah dikeluarkan oleh komunitas internasional belum memberi dampak nyata terhadap penghentian agresi Israel.

Oleh karena itu, tekanan dari masyarakat sipil menjadi instrumen penting dalam perjuangan rakyat Palestina.

Potensi tersebut berasal dari keterikatan historis antara masyarakat Indonesia dan Palestina. Solidaritas kuat terhadap Palestina telah ada sejak kemerdekaan Indonesia berlangsung. Selain karena memiliki sejarah yang sama karena menjadi korban dari kolonialisme dan imperialisme, Palestina juga merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944—setahun sebelum Indonesia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya (Alisjahbana, 2019). Oleh karena itu, rasa empati yang telah timbul sejak ini perlu diarahkan secara lebih konkret dan terkoordinir agar dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap pihak-pihak yang mendukung pendudukan Israel.

Secara umum, BDS Indonesia mengusung misi yang sejalan dengan BDS Global, yaitu mendorong boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel sampai negara tersebut menghentikan pendudukan atas wilayah Palestina dan mematuhi hukum internasional. BDS Indonesia menilai bahwa meskipun Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel (Strangio, 2025), Indonesia memiliki hubungan dekat dengan negara yang menjadi ekspor utama Israel, seperti Amerika Serikat. Artinya, Indonesia turut mendukung secara tidak langsung terhadap negara tersebut melalui kerja sama ekonomi global dan menjadi konsumen dari perusahaan ternama—terutama dengan perusahaan yang memberikan bantuan kepada Israel. Kampanye yang dilakukan oleh BDS Indonesia bukan dimaksudkan untuk mengusir perusahaan

tersebut dari Indonesia, melainkan untuk memberi tekanan moral dan ekonomi agar mereka memutuskan kerja sama dengan Israel.

Setelah peluncuran gerakan BDS Indonesia dalam webinar yang telah disebutkan, aktivitas kampanye mereka akan dimulai dari *website* dan media sosial (IQRA Perspective, 2021). Bentuk kampanye berupa publikasi daring yang bersifat mengedukasi masyarakat dan menjelaskan jika gerakan BDS adalah gerakan nonkekerasan dan anti-diskriminasi—menolak segala bentuk rasisme, antisemitisme, hingga islamofobia. Pemanfaatan ruang digital ini menunjukkan bahwa BDS Indonesia beroperasi yang sejalan dengan logika *connective action*, dimana media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi utama dan memungkinkan untuk menarik banyak orang untuk terlibat dalam gerakan (Bennett & Segerberg, 2012). BDS Indonesia juga menyebarkan panduan dan materi kampanye tentang perusahaan-perusahaan yang menjadi target boikot. Pada intinya, semua kampanye yang dikemas bertujuan untuk mengedukasi masyarakat apabila terdapat banyak perusahaan yang berkontribusi terhadap penyerangan Israel ke Palestina serta menambah kesadaran publik bahwa memberi dukungan terhadap Palestina tidak hanya isu agama, melainkan juga isu kemanusiaan.

Dalam perkembangannya, gerakan BDS Indonesia mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dukungan ini tidak bersifat langsung, melainkan terdapat agenda yang sama antara MUI dengan BDS Indonesia. Pada tahun 2023, dikeluarkan sebuah fatwa MUI yang menghimbau masyarakat muslim Indonesia untuk berpartisipasi mendukung perjuangan Palestina dengan

menekan pembelian produk terafiliasi Israel. Fatwa MUI No. 83 menyebut bahwa tindakan agresi Israel memiliki pihak-pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung (MUI, 2023). Bentuk dukungan tersebut meliputi bantuan persenjataan, tenaga militer, finansial perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga pembelian produk yang secara nyata mendukung agresi Israel. MUI secara tegas menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib bagi muslim. Bentuk perjuangan yang dapat dilakukan masyarakat dengan menggalang dana kemanusiaan, mendoakan untuk kemenangan, mendukung jalur diplomasi Indonesia di PBB untuk menghentikan perang, hingga menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk terafiliasi Israel.

Secara keseluruhan, peluncuran gerakan BDS di Indonesia menandai langkah konkret keterlibatan masyarakat Indonesia untuk mendukung dan memberi solidaritas untuk terbentuk diarahkan menjadi aksi kolektif yang lebih terkoordinasi. BDS Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip dari gerakan BDS global dan menyampaikannya ulang dengan pemahaman yang menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

2.3. Nilai Solidaritas dalam Gerakan BDS

Gerakan BDS memiliki unsur yang kuat terhadap nilai solidaritas. Gerakan BDS mampu menarik banyak dukungan dari lapisan masyarakat di seluruh dunia. Penindasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina berlangsung

selama puluhan tahun dan belum menemukan titik damai hingga saat ini. Beberapa akademisi menyebut bahwa sejak peristiwa berdirinya Israel pada tahun 1948, Palestina telah berfungsi sebagai magnet emosional yang menarik serta membangkitkan emosi seperti kemarahan terhadap kolonialisme, tanggung jawab keagamaan, dan rasa bersalah atas Holocaust (Penslar, 2025). Dalam kacamata konstruktivisme, magnet emosional ini merefleksikan tentang pembentukan identitas. Dukungan yang muncul merupakan hasil dari konstruksi identitas yang dibangun melalui sejarah dan moralitas kemanusiaan. Beberapa pihak memberikan persepsi masing-masing mengenai isu Palestina: dari kelompok keagamaan—Kristen, Yahudi, dan Islam—menyebut bahwa lokasi tersebut adalah tempat suci sebagai asal muasal agama mereka berada; sebagian besar negara yang mengalami kolonialisme, Global South, menganggap bahwa yang dialami masyarakat Palestina tidak beda dengan apa yang mereka pernah alami sehingga mereka menganggap Palestina adalah simbol perjuangan melawan penindasan; lalu, sebagian masyarakat di negara Barat mendukung Israel karena penyesalan mereka terhadap peristiwa Holocaust dan menganggap kritik yang dilemparkan pada mereka termasuk sikap antisemitisme. Perbedaan pandangan dari berbagai pihak yang terus terjadi hingga saat ini tidak mengubah fakta jika Israel telah melanggar hukum internasional. Inilah sebab ketika gerakan BDS diluncurkan dan dikampanyekan di seluruh dunia, masyarakat global menaruh perhatian besar di dalamnya. Gerakan BDS meletakkan momentum sebagai bentuk solidaritas

lintas batas yang menekankan nilai keadilan dan tanggung jawab moral masyarakat global terhadap kemanusiaan.

Nilai keadilan dan tanggung jawab moral tersebut dapat dicerminkan dalam unsur *political solidarity* yang diusung oleh Scholz. Solidaritas tersebut muncul karena ada fenomena ketidakadilan dan penindasan, tepat seperti solidaritas dalam gerakan BDS yang muncul sebagai respons atas ketidakadilan dan penindasan yang dialami rakyat Palestina. Ketika suatu pihak menyadari bahwa ada yang harus diubah dari situasi tersebut, mereka bersama-sama membentuk sebuah aksi kolektif untuk memperjuangkan kesetaraan yang seharusnya mereka dapatkan. Ketiga prinsip yang dibawa oleh gerakan BDS—keadilan, kebebasan, dan kesetaraan—mencerminkan nilai solidaritas yang terdapat pada *political solidarity*. Mereka mengampanyekan aksi boikot, divestasi, dan sanksi kepada seluruh lapisan masyarakat di dunia dan memunculkan sikap kesadaran yang berlandaskan kemanusiaan—menunjukkan sifat solidaritas ini tidak melihat latar belakang atau dari mana mereka berasal. Mereka juga tidak mengharuskan pihak-pihak pernah mengalami suatu penindasan atau ketidakadilan, karena nilai solidaritas semacam ini lebih memerlukan sikap kesadaran dan hati nurani untuk memahami bagaimana suatu penindasan dapat terjadi, dan mereka memiliki kesepakatan yang sama untuk mengubah situasi tersebut di masa depan. Jadi, nilai solidaritas yang terdapat dalam gerakan BDS termasuk jenis solidaritas *political solidarity* karena muncul dari fenomena ketidakadilan dan mengedepankan rasa kesadaran yang tinggi terhadap moralitas manusia.

Lebih lanjut, gerakan BDS menerjemahkan nilai solidaritas itu dalam simbol yang dapat diamati secara nyata. Meski mereka tidak memiliki slogan resmi saat berkampanye, gerakan BDS mencantumkan “*freedom, justice, equality*” dalam logo. Ketiga prinsip tersebut merupakan norma internasional yang diinternalisasi oleh gerakan BDS. Secara konstruktivisme, gerakan BDS berupaya mendefinisikan bahwa seruan global untuk melakukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel merupakan tindakan yang secara moral ‘benar’ bagi aktor yang menjunjung tinggi kemanusiaan.



Gambar 2. 2. Logo Gerakan BDS

Sumber: <https://bdsmovement.net/>

Penerapan simbol pada gerakan BDS terdapat dalam logo mereka. Berbentuk persegi panjang dengan tulisan BDS berwarna merah, di sebelah kanan logo terdapat simbol Handala yang membawa benda semacam timbangan dan ketiga nilai yang dibawa oleh BDS, “*FREEDOM, JUSTICE, EQUALITY*”. Handala merupakan ilustrasi karakter anak laki-laki yang punggungnya menghadap ke depan, kakinya telanjang, pakaiannya compang-camping, rambut yang seperti landak, dan tangan yang saling bertumpu di atas punggung. Handala terinspirasi langsung dari bocah sepuluh tahun bernama Handal, yang merupakan korban pengusiran warga Palestina pada tahun 1948 (Al-Shalchi, 2024). Ilustratornya, Naji al-Ali, merupakan seorang aktivis nasionalis pan-

Arab yang telah dipenjara berkali-kali karena tindakan anti-pemerintahnya. Menurutnya, Handala merupakan simbol perlawanan dan penolakan terhadap solusi dari negara asing yang dipaksakan kepada Palestina. Warna dari logo tersebut mengambil warna merah pada bendera Palestina, yang mewakili arti dari perjuangan rakyat Palestina kepada tanah air mereka.



Gambar 2. 3. Tampilan *website* Gerakan BDS

Sumber: <https://bdsmovement.net/>



Gambar 2. 4. Tampilan <https://bds.visualizingpalestine.org/> sebagai *website* yang memberikan informasi terkait perkembangan gerakan BDS secara global

Sumber: <https://bds.visualizingpalestine.org/>

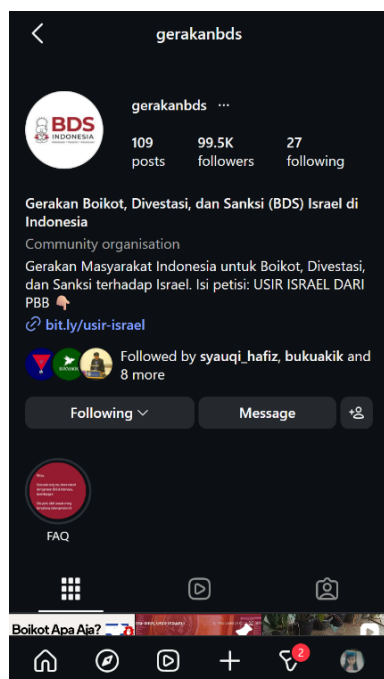
Gerakan BDS juga menggunakan warna-warna bendera Palestina dalam pedoman kampanye mereka. Seperti yang dapat dilihat langsung pada situs web gerakan BDS, <https://bdsmovement.net/>, penggunaan warna bendera Palestina: merah, hijau, putih, dan hitam diatur sedemikian rupa sehingga menampilkan

bahwa gerakan ini memang mewakili seluruh rakyat Palestina. Penggunaan simbol Handala dan warna bendera Palestina berfungsi sebagai instrumen konstruksi makna. Melalui simbol tersebut, gerakan BDS membangun narasi perlawanan yang dapat dipahami secara luas sehingga memudahkan proses penyebaran solidaritas. Selain itu, perkembangan gerakan BDS divisualisasikan secara menarik dan informatif melalui situs web <https://bds.visualizingpalestine.org/>. Situs tersebut memudahkan siapa pun untuk memahami bahwa gerakan BDS telah memberikan efek yang nyata dan terus sejalan dengan ketiga nilai global yang mengikutinya.

Sementara itu, gerakan BDS di Indonesia telah menjunjung tinggi nilai solidaritas terhadap Palestina sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Asy'ari, pernah menjalani satu institusi pendidikan yang sama dengan pemimpin tertinggi Dewan Palestina—disebut Grand Mufti of Jerusalem, Syekh Muhammad Amin al-Husaini (Alisjahbana, 2019). Ketika Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya pada tahun 1944, al-Husaini sudah mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi dan bahkan ia menyiarkannya lewat Radio Berlin hingga mengirim telegram ke Jepang agar segera menepati janji untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, al-Husaini berhasil mendorong negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Suriah, Lebanon, dan Yaman untuk memberi pengakuan secara *de jure* kepada Indonesia. Pemberian dukungan ini berarti besar untuk pihak Indonesia—terutama mengingat mereka sama-sama negara yang baru saja mengalami kolonialisme. Selain itu,

keterikatan secara religius juga terjalin karena Indonesia menganggap Palestina memiliki bersejarah bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Titik inilah yang menjadikan bahwa Indonesia memiliki nilai solidaritas terhadap Palestina sejak dahulu.

Apabila ditarik kembali tentang *political solidarity* oleh Scholz, solidaritas yang dimiliki masyarakat Indonesia berlandaskan atas keterikatan moral atas kesamaan sejarah penindasan dan juga rasa kemanusiaan yang tinggi. Tidak mengherankan jika Indonesia senantiasa selalu berhubungan baik dengan Palestina hingga kini. Di awal kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan kerap kali melarang atlet Israel berpartisipasi dalam Asean Games yang bertempat di Indonesia. Pada pemerintahan Soeharto, Indonesia mengakui Palestina sebagai negara dan mendirikan kedutaan Palestina di Jakarta 1990. Hingga pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia sama sekali tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan konsisten memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Salah satunya adalah pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di tahun 2015 (Peterson, 2025).



Gambar 2. 5. Akun Instagram Gerakan BDS Indonesia (@gerakanbds)



Gambar 2. 6. Akun X Gerakan BDS Indonesia (@GerakanBDS_ID)

Sumber:

<https://www.instagram.com/gerakanbds/>

Sumber:

https://x.com/GerakanBDS_ID

Sikap dan tindakan seperti ini sudah mendasari alasan mengapa gerakan BDS layak berkembang di Indonesia. Dalam webinar peluncuran Gerakan BDS Indonesia, para *co-founder* menyebut bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam memiliki keterikatan sejarah dan empati terhadap Palestina. Nilai-nilai tersebut—keterikatan sejarah dan empati—dapat diarahkan menjadi gerakan yang lebih terstruktur untuk mendukung Palestina meraih tujuan sebenarnya. Oleh karena itu, gerakan BDS di Indonesia banyak memberikan kampanye secara visual melalui media sosial seperti Instagram dan X. Penyampaian kampanye menggunakan bahasa yang mudah dipahami terutama bagi anak muda karena merekalah yang mudah menyerap informasi

dengan cepat dan mudah pula untuk menyebarkannya kepada pihak-pihak lain. Meski gerakan BDS di Indonesia baru terbentuk pada tahun 2021, jumlah pengikut akun Instagram BDS Indonesia (@gerakanbds) telah mencapai hampir seratus ribu dan akun X BDS Indonesia (@GerakanBDS_ID) yang mencapai 42 ribu pengikut. BDS Indonesia juga menjalankan situs web resmi pada laman gerakanbds.id dimana isinya terdapat informasi tentang bagaimana gerakan BDS bekerja dan pedoman kampanye yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Penyesuaian terminologi dan penggunaan narasi sejarah oleh BDS Indonesia menunjukkan proses penyesuaian ulang yang dilakukan BDS Indonesia. Oleh karena hal tersebut, nilai solidaritas global tidak diterima masyarakat begitu saja secara pasif, tetapi juga dikonstruksi ulang agar memiliki keselarasan sifat masyarakat Indonesia.

2.4. Jaringan Advokasi Transnasional dalam Gerakan BDS

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, gerakan BDS memiliki satu badan yang berperan sebagai koordinator dari berbagai kampanye BDS di seluruh dunia. BDS National Committee (BNC) merupakan badan koordinasi Palestina untuk kampanye gerakan BDS di seluruh dunia. Badan ini dibentuk pada tahun 2007 atas koalisi masyarakat Palestina yang terdiri dari berbagai kalangan. BNC berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan dan mengoordinasikan berbagai kampanye gerakan BDS di tingkat lokal maupun global. Akan tetapi, BNC bukanlah "pemimpin" atau "pusat" dari gerakan BDS, melainkan hanya fasilitator untuk menghubungkan antaraktor di

setiap negara (BDS, n.d.). Contohnya, ketika kampanye untuk Palestina tumbuh di masyarakat sipil Amerika Serikat, US Campaign for Palestinian Rights (USCPR) pada tahun 2001—empat tahun sebelum gerakan BDS resmi muncul—mereka bergerak secara mandiri dan berfokus memperjuangkan isi dari kampanye di wilayah mereka. Ketika seruan gerakan BDS global muncul, badan kampanye tersebut menyatakan untuk bergabung dengan seruan lalu berkoordinasi dengan BNC hingga mereka menjadi sponsor fiskal untuk organisasi tersebut (Rosen & Leibovitz, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa BNC menghubungkan antaraktor penggerak gerakan BDS dari satu negara ke negara lain dan membentuk suatu jaringan.

Jaringan yang sama terlihat ketika gerakan BDS di Indonesia diluncurkan melalui webinar “Webinar & Launching BDS MOVEMENT INDONESIA: Strategi Melawan Apartheid Israel” pada 29 Mei 2021. Webinar tersebut dihadiri langsung oleh *co-founder* gerakan BDS, Omar Barghouti, dan salah satu perwakilan BNC, Apoorva Gautam—dimana dia juga seorang koordinator gerakan BDS untuk wilayah Asia Pasifik (IQRA Perspective, 2021). Salah satu *co-founder* BDS Indonesia, Dimas Muhammad, juga menyatakan bahwa dia beberapa kali berhubungan langsung dengan Omar Barghouti untuk membahas tentang pelaksanaan gerakan BDS di Indonesia secara terstruktur. Interaksi dan komunikasi kedua pihak tersebut menunjukkan bahwa ada semacam pertukaran gagasan serta ide antaraktor lintas negara yang menjadi dasar pembentukan strategi gerakan BDS di Indonesia.

Gerakan BDS global maupun BDS Indonesia merupakan bagian dari jaringan advokasi transnasional. Sebagian besar penggerak dari gerakan BDS adalah para aktivis, atau bahkan masyarakat sipil dari berbagai golongan—karena gerakan ini sifatnya dapat mengajak siapa pun untuk ikut berkampanye—yang mana termasuk dalam jenis aktor nonnegara. Baik atau tidak melalui BNC, beberapa aktor penggerak gerakan BDS di berbagai negara saling berinteraksi satu sama lain dan membentuk suatu jaringan, sebagai contoh adalah USCPR yang memiliki keterkaitan langsung dengan BNC dan gerakan BDS di Indonesia yang koordinasi pembentukannya juga telah mengalami proses pertukaran informasi dengan pihak gerakan BDS global. Semua pihak tersebut memiliki ide dan nilai-nilai yang menjadi fokus utama: memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi rakyat Palestina.

Gerakan BDS memiliki karakteristik yang jelas ketika menjalankan peran sebagai jaringan advokasi transnasional. Gerakan ini tidak muncul karena kepentingan politik atau ekonomi global, tetapi komitmen moral untuk mengubah suatu perilaku atau kebijakan yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini, gerakan BDS berusaha menekan komunitas internasional, pihak-pihak yang terlibat dengan Israel atas tindakan penindasannya terhadap rakyat Palestina—untuk segera memberikan sanksi kepada Israel atau hingga negara tersebut mematuhi hukum internasional dan mengutamakan kemanusiaan. Gerakan BDS tidak memiliki pusat atau pemimpin dari jaringan. BNC, yang telah disebutkan, hanyalah pihak yang berwenang sebagai koordinator dan fasilitator. Sementara aktor gerakan BDS di setiap negara saling berinteraksi yang bersifat

timbang balik dan memperjuangkan tujuan yang sama untuk menekan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dengan Israel.

Seperti halnya aktor dalam TANs yang memiliki empat taktik untuk membujuk, menyosialisasikan, dan memberikan tekanan kepada pihak tertentu, gerakan BDS juga mengadopsi taktik tersebut. *Information politics*, gerakan BDS menghasilkan dan memindahkan informasi tersebut kepada pihak yang memiliki dampak terbesar. *Symbolic politics*, gerakan BDS memanfaatkan simbol, tindakan, atau cerita yang dapat menarik perhatian publik. *Leverage politics*, gerakan BDS berusaha memanggil seruan global untuk bersama-sama menekan pihak yang memiliki keterlibatan dengan Israel. *Accountability politics*, gerakan BDS menuntut tanggung jawab moral dari masyarakat dan perusahaan dengan menyatakan sikap untuk tidak berhubungan dengan Israel maupun tindakan penindasannya terhadap rakyat Palestina.

Gerakan BDS berangkat dari kesadaran kemanusiaan, memperjuangkan keadilan untuk semua bangsa—mereka menganggap jika penindasan yang dialami rakyat Palestina sama saja dengan ketidakadilan global. Melihat betapa pesatnya teknologi saat ini, gerakan BDS memanfaatkan platform digital sebagai ruang gerak mereka dalam melakukan kampanye dan menjangkau banyak pihak untuk terlibat secara langsung tanpa memerlukan suatu prosedur khusus. Gerakan ini memerlukan proses dan dinamika waktu yang panjang, baik dalam level global apalagi lokal, agar terlihat sebagai suatu jaringan yang memiliki kesatuan tujuan dan target bersama. Gerakan BDS menganggap komunitas internasional tidak mampu memberikan sanksi kepada Israel

sehingga harus memanggil seruan global untuk melakukan tekanan. Hal ini berlaku untuk pihak-pihak yang berkolaborasi dengan gerakan BDS, termasuk BDS Indonesia.